

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Algra, N.E., H.R.W. Gokkel dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda Indonesia, Jakarta: Binacipta, 1998.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budiono, Harlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Hukum Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistemika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003,
- Ence, Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2008.
- Habib, Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Rafika Adisama, 2008
- _____, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- _____, *Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, materi disampaikan pada saat seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia di Hotel Grasia Semarang pada tanggal 19 Desember 2016.
- Hadikusuma, Hilaman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Jehani, Libertus, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rana Pustaka, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1992.

- Naja, H.R. Daeng, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, , Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1991.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sing, Ko Tjay, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Semarang: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Soeroso, R, *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soetojo, Prawirohamidjojo, dan Asis Safiodien, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan V Bandung: Alumni, 1987.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1989.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- Sukanto, Suryono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. empat belas, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Hukum Kualitaif Bagian II*, : Surakarta: UNS Press, 1998.
- Thamrin, Husni, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Tobing, GHS. Lumbun, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. ke 3, Jakarta: Erlangga, 1982.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, 1960, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No 5, LN No. 1960-104 Tahun 1960, TLN No 2043.

_____, 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksana Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No 9, LN No 12 Tahun 1974, TLN No 3050.

_____, 1974, Undang- Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, UU No 1, LN No 1 Tahun 1974, TLN No 3019.

_____, 2011, Undang-Undang Republik Indonesia tentang *Mahkamah Konstitusi*. UU No. 8 LN Nomor 70 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 2008, diterjemahkan oleh. R. Subekti, Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 20 Agustus 1975, Nomor MA/Pemb/0807, tentang Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

C. Internet

Alwesi, Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi <http://alwesi.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>.

D. Sumber Lainnya

Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, di Hotel Grasia Semarang, pada tanggal 19 Desember 2016